

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur. Negara ini berbentuk negara kepulauan dengan 6.852 pulau besar maupun kecil (Shindo, 2015). Saat ini, Jepang merupakan negara yang menduduki urutan ketiga sebagai negara dengan ekonomi terbesar setelah Amerika Serikat dan China (Tiongkok). Pendapatan Domestik Bruto atau PDB Nominal Jepang adalah US\$ 5,443 triliun dengan Pendapatan Per Kapita sebesar US\$42.900 (Saragih, 2018).

Meskipun Jepang kini telah dikenal sebagai salah satu negara yang berpengaruh di dunia dengan perkembangan ekonomi yang stabil dan signifikan, sejarah mencatat bahwa Jepang pernah mengalami masa suram pada akhir abad ke-20 dimana saat itu Jepang mengalami kekalahan pada perang dunia ke-2 yang ditandai dengan pengeboman dua kota penting di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat yang mana kejadian ini menciptakan perubahan besar bagi dunia. Meskipun sempat mengalami keterpurukan dimasa lalu, Jepang berhasil membuktikan bahwa negaranya mampu bangkit dari keterpurukan dalam waktu yang cukup singkat.

Kini eksistensi Jepang sebagai negara yang maju di bidang pengembangan teknologi dan industri tidak diragukan lagi, kemajuan teknologi dan industry yang dimiliki Jepang memberikan pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara ini, sehingga negara yang dulunya hancur karena kekalahan perang dunia kedua kini menjadi salah satu negara maju dengan pendapatan tertinggi di dunia (*high-income country*). Pengembangan teknologi sangat penting sebagai salah satu elemen era globalisasi dan peningkatan daya saing.

Selain itu, kemajuan teknologi suatu negara merupakan cerminan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Salah satu bukti kemajuan teknologi yang dimiliki Jepang adalah dalam pengembangan sistem sanitasi, Jepang telah mencapai akses universal terhadap penyediaan air dan sanitasi, bahkan Jepang merupakan negara dengan tingkat kerugian distribusi air terendah di dunia karena negara ini memiliki standar yang ketat terhadap kualitas air minum dan air limbah dengan menggunakan sistem nasional yang efektif untuk utilitas air dan sanitasi, pengembangan sanitasi di Jepang merupakan perpaduan antara teknologi canggih dan teknologi yang tepat. (*advanced and appropriate thecnologies*) (International Water Association, 2018).

Sanitasi mencakup segala hal yang berhubungan dengan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat; atau dalam kata lain sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Dari definisi sanitasi tersebut terdapat satu tujuan yang ingin dicapai yaitu menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, tujuan tersebut dicapai melalui usaha untuk merawat segala elemen dimuka bumi yaitu tanah, air dan udara.

Jepang sendiri dalam pengelolaan air telah menggunakan teknologi pipa *stainless steel*, penggunaan *stainless steel* ini berhasil mengurangi tingkat kerugian air karena bahan pipa yang terbuat dari *stainless steel* beresiko rendah terhadap kebocoran. Teknologi filterisasi air yang dikembangkan Jepang juga sangat canggih dengan menggunakan karbon aktif (Ministry of Health, Labour and Welfare, 2019).

Selain berfokus pada pengelolaan sanitasi di negaranya, Jepang juga memiliki *concern* yang tinggi terhadap pengelolaan sanitasi secara global, Jepang merupakan pendonor terbesar di dunia dalam sektor air dan sanitasi dan telah memberikan bantuan berupa pengalaman, pengetahuan dan teknologi terkait pengelolaan sanitasi yang dimilikinya. Jepang tercatat memiliki berbagai kerjasama dibidang sanitasi dan membentuk berbagai forum terbaik sanitasi diantaranya adalah WASABI atau *Water and Sanitation Broad Partnership Initiative* pada tahun 2006 dan pada tahun 2002 membentuk kerjasama dengan Amerika Serikat bernama *United States-Japan Clean Water for People Initiative*. Selain itu Jepang juga pernah mejadi tuan rumah untuk *Third World Water Forum* pada tahun 2003, mendukung dan memastikan dilaksanakannya resolusi pada *International Year of Sanitation 2008* di *United Nation General Assembly* pada tahun 2007 dan berkomitmen untuk mensupport kerjasama multilateral dalam hal sanitasi (Ministry of Foreign Affairs of Japan , 2014) dan baru-baru ini pada tahun 2018 Jepang menjadi tuan rumah *IWA World Water Congress & Exhibition 2018* yang dilaksanakan di kota Tokyo (International Water Association, 2018).

Selain itu, Jepang juga banyak membantu masalah terkait sanitasi diberbagai negara, salah satunya adalah India, negara ini termasuk dalam *negara poor sanitation country*, menurut data dari World Bank memperkirakan bahwa 21 persen penyakit menular di India disebabkan oleh air yang tidak bersih dan kurangnya praktik kebersihan. Lebih dari 500 anak di bawah usia lima tahun setiap hari terkena diare di India (India's Water and Sanitation Crisis, n.d.). Jepang melalui JICA (*Japan International Cooperation Agency*) sebuah agensi pemerintah yang mengurus *official development assistance* (ODA) memberikan bantuan kepada India berupa pendampingan dalam pembangunan fasilitas sanitasi seperti toilet umum,

lebih dari 1.500 toilet umum dibangun untuk mengurangi kebiasaan buang air sembarangan di India (Sakamoto, Japan-India Friendship: Activities of JICA in India, 2018).

Kebijakan luar negeri Jepang berupa bantuan dalam bidang sanitasi untuk beberapa negara ini menunjukkan bahwa Jepang menaruh perhatian yang besar dalam bidang ini, yang mana hal ini sangat jarang dilakukan oleh negara lain. Isu sanitasi terbilang isu yang tidak terlalu populer bagi negara lain, namun Jepang justru memiliki antusiasme yang sangat besar dalam isu ini.

Sebenarnya, dalam hubungan internasional persoalan mengenai sanitasi bukanlah persoalan kecil, ini adalah hal yang sangat penting bagi pengembangan negara modern, baik atau buruknya pengembangan sanitasi sangat berdampak pada pembangunan suatu negara karena kebutuhan akan pengelolaan sanitasi yang baik merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Masalah sanitasi bahkan menjadi salah satu dari 17 poin SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu poin nomor 6 yang berbunyi “memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan”, dari poin ke enam ini salah satu target yang ingin dicapai pada tahun 2030 adalah “mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk semua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan (BABS)” (Indonesia, 2015).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah: “Mengapa Jepang aktif berperan didalam masalah sanitasi internasional?”

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran Jepang dalam menangani masalah terkait sanitasi internasional
2. Mengetahui alasan Jepang aktif berperan didalam masalah sanitasi internasional

### D. Kerangka Pemikiran (Teori Konstruktivisme)

Konstruktivisme merupakan salah satu bagian dari teori post-positivisme, pemikiran utama para kaum post-positivisme adalah bahwa dalam mengamati ilmu sosial adalah tidak mungkin jika tidak melibatkan si pembuat teori didalanya, artinya adalah akan selalu ada subjektivitas si pembuat teori dalam teori yang ia ciptakan, berbeda dengan pendekatan positivisme yang objektif. Pendapat kaum post-positivisme tentang subjektivitas ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Robert Cox “*There is not theory itself: theory is always for someone, some purposes. There is no neutral theory concerning human affairs, no theory of universal validity. Theory derives from practice and experiences, and experience is related to time and place. Theory is a part of history.*” (Alexander Wendt J. S., 2014)

Munculnya teori-teori baru seperti feminisme, konstruktivisme dan *English school* merupakan bentuk pemberontakan kaum post-positivisme terhadap kaum positivisme. Richard Rorty seorang ahli filsafat mengatakan adanya semacam revolusi filosofi dalam bentuk pembelokan linguistik (*the linguistic turn*) yaitu perhatian HI yang dulunya berfokus pada konsep-konsep dan ide-ide universal ke kata-kata dan simbol-simbol linguistik yang dianggap lebih mewakili konteks lokal (Hadiwinata, 2017)

Dalam konstruktivisme, dunia sosial adalah merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh manusia.

Jadi, dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given* seperti yang digambarkan oleh kaum positivis melainkan dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif artinya adalah masyarakat berperan penting didalam dunia sosial karena masyarakatlah yang memaknai dunia sosial tersebut karenanya kaum konstruktivisme menekankan pada peran pemikiran, pengetahuan bersama atas dunia sosial (Robert Jackson, 1999). Jadi, kaum konstruktivisme memandang dunia sosial sebagai sesuatu yang sedang diciptakan atau sebagai suatu proses melahirkan sesuatu bukan sesuatu yang telah ada atau “terberi”, sehingga pembentukan identitas adalah sangat penting dan dinamis dalam mengkonstruksi dunia sosial.

Nicholas Onuf menawarkan satu paradigma baru yang memperhatikan karakter politik dan batas-batas tradisional, ia memahami bahwa konstruktivisme merupakan asumsi bahwa orang atau masyarakat itu mengkonstruksi atau menyatakan satu sama lain atau dalam kata lain konstruktivisme adalah berdasarkan pada kelakuan baik tindakan fisik maupun ucapan kata-kata (Alexander Wendt E. O., 2000).

Menurut Friedrich Kratochwil di dalam karyanya yang berjudul *Rules, Norms, and Decision; On the Condition of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs*. Berpendapat bahwa konstruksi hidup bersama dalam komunitas internasional adalah sebuah “proses pembelajaran” (*learning process*) interaksi antar subjek yang dibentuk oleh identitas (*identity*), kepentingan (*interest*), nilai-nilai (*values*) dan maksud (*intention*) yang membentuk dan menentukan pola-pola hubungan tertentu sebagai “sahabat” (*friends*) atau “musuh” (*enemy*). Jadi, berbeda dengan pendekatan-pendekatan positivisme yang percaya bahwa hubungan antar-

bangsa terjalin karena untuk mencapai kepentingan semata, konstruktivisme memahami hubungan antar-bangsa sebagai sesuatu yang lebih kompleks dan didasari oleh unsur lain seperti norma, identitas, intensi dan Bahasa (Friedrich, 1989).

Dalam konstruktivisme, norma memiliki peran yang sangat penting karena norma menentukan bagaimana negara seharusnya bertindak dalam isu tertentu. Bagi kaum konstruktivisme norma merupakan “harapan-harapan bersama yang dianut oleh sekelompok aktor mengenai perilaku yang pantas” (Finemore, 1996). Dalam interaksi hubungan internasional, negara melakukan suatu tindakan karena mereka dituntut oleh aturan-aturan, prinsip-prinsip, norma-norma yang disepakati bersama. Dalam kata lain, norma adalah segala sesuatu yang dianggap pantas oleh komunitas internasional yang akhirnya mendorong setiap negara untuk melaksanakannya (Rosyidin, 2015).

Norma dan gagasan yang terlembaga bersifat rasional karena keduanya memiliki kekuatan moral dan konteks sosial. Pelembagaan norma sendiri dibagi menjadi dua yaitu di tingkat internasional (norma struktural) maupun tingkat nasional (norma domestik). Norma struktural adalah tatanan nilai dan kaidah yang dikonstruksikan oleh aktor-aktor internasional yang kemudian memaksa aktor-aktor tersebut berperilaku sesuai dengan standar moralitas yang telah dikonstruksikan tersebut, sementara norma domestik adalah merupakan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh suatu negara. Jadi, perbedaan antar keduanya terletak pada ruang lingkungannya dan siapa yang menciptakan norma (Rosyidin, 2015).

Pandangan berbeda mengenai norma datang dari kaum tradisional, mereka menekankan pada sifat

negara yang rasional atau yang selalu mempertimbangan untung-rugi sehingga negara selalu diidentikan dengan egoisme, maka dalam memaknai norma kaum realis-liberal menganggap norma adalah “alat” kepentingan nasional, karenanya kaum realis-liberal memandang norma tidak lebih dari sekedar medium bagi aktor untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara bagi kaum konstruktivisme, negara merupakan sebuah entitas sosial. Negara bertindak bukan berdasarkan rasionalisme (untung-rugi) melainkan berdasarkan pertimbangan mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk, jadi norma bukan dianggap sebagai alat kepentingan negara. Negara menjadi taat aturan (norma) karena ada struktur sosial yang menekankan negara untuk mengikuti aturan yang telah disepakati bersama (Rosyidin, 2015, pp. 74-75).

Kemudian, norma seringkali dikaitkan dengan identitas karena pada dasarnya keduanya memang tidak dapat dipisahkan, norma merupakan unsur yang membentuk identitas karena norma berperan sebagai pembentuk jati diri aktor dalam konteks sosial tertentu. Menurut Naomi Ellemers dalam bukunya yang berjudul *Self and Social Identity*, konsep identitas dapat dipahami sebagai atribut atau karakteristik yang membedakannya dengan yang lain. Jadi, identitas adalah sesuatu yang terkonstruksi di dalam proses interaksi dengan pihak lain karenanya dibutuhkan



intersubjektivitas untuk memaknai identitas tersebut (Naomi Ellemers, 2002).

	Tipping Point		
	Stage 1 Norm Emergence	Stage 2 Norm Cascade	Stage 3 Internalization
Actors	Norm entrepreneurs with organizational platforms	States, international organizations, networks	Law, professions, bureaucracy
Motives	Altruism, empathy, ideational commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
Dominant mechanism	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Source: Finnemore and Sikkink (1998, 898).

*Gambar 1: Norm of Life Cycle*

Finnemore dan Sikkink menjelaskan bagaimana dan mengapa norma internasional tertentu berhasil dipromosikan, disebarkan, dan diadopsi oleh negara di komunitas internasional. Dalam upaya mereka untuk mengkonseptualisasikan munculnya norma baru, Finnemore dan Sikkink Menggambar pada wawasan yang diperoleh dari teori hukum Amerika Serikat, kelembagaan sosiologi dan teori hubungan internasional. Berkenaan dengan teori hukum, mereka menunjukkan bahwa, di ranah internasional, proses serupa untuk proses domestik sedang bekerja ketika norma baru muncul. Finnemore dan sikkink berpendapat bahwa norma terbentuk dan berevolusi dalam tahap norma siklus hidup (*stage of norm life cycle*) (Thomas Risse, 1999).

Didalam *stage of norm life cycle* Finnemore dan Sikkink membedakan tiga tahapan: pertama *Norm Emergence*, di mana pelaku utama adalah seorang *norm entrepreneur*; kedua, *tipping point* diikuti oleh *norm cascade* atau mengalirnya norma dan norma telah diterima secara luas oleh negara; dan ketiga, *norm internalization* yaitu dimana norma telah terspesifikasi dalam dokumen hukum atau perjanjian bilateral.

Finnemore dan Sikkink berpendapat bahwa dampak domestik sangat penting selama fase pertama.

Peran yang dilakukan Jepang dalam kebijakan luar negerinya berupa bantuan terhadap masalah-masalah terkait sanitasi di berbagai negara merupakan usaha untuk membangun sebuah konstruksi internasional tentang identitas negaranya. Masalah sanitasi bagi negara lain mungkin bukan isu yang terlalu diperhatikan, namun sebaliknya, Jepang memiliki antusiasme yang tinggi terhadap isu ini dan menjadikan ini sebagai sesuatu yang mencerminkan negaranya atau sebagai *identity* negaranya. Jepang berusaha untuk menawarkan ide-ide, norma dan *values* yang dipegang negaranya melalui sistem sanitasinya yang baik dan toilet umum yang bersih dan canggih.

Peran serta Jepang dalam berbagai forum terkait sanitasi dan bantuan yang diberikan Jepang kepada berbagai negara mungkin tidak menguntungkan dari segi ekonomi, namun seperti yang dikatakan kaum konstruktivisme bahwa negara bukan aktor yang selalu mengedepankan rasionalisme atau untung-rugi, tindakan yang dilakukan Jepang memang tidak menguntungkan tapi ada suatu hal yang lebih kompleks yang ingin dicapai oleh Jepang yaitu pembangunan identitas melalui penyebaran norma yang dipegang oleh negaranya yang diharapkan dapat diadopsi oleh negara lain dan menjadi norma bersama.

Pentingnya pengelolaan sanitasi disuatu negara sangat erat kaitannya dengan budaya yang menunjukkan karakter sebuah negara. Misalnya, kondisi toilet umum yang berada disuatu kota atau negara dengan keadaan yang sangat buruk dan tidak terawat secara tidak langsung menunjukkan kebiasaan masyarakatnya yang “jorok”, tidak peduli terhadap kebersihan dan kesehatan serta kurang bertanggung

jawab terhadap kebersihan fasilitas publik. Secara lebih luas, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap citra suatu negara bagi persepsi masyarakat internasional. Jepang telah berhasil membangun citra negaranya sebagai negara yang baik dalam sistem sanitasi melalui kebersihan toilet umum serta kecanggihan pengelolaan air dan limbah. Kini Jepang membawa nilai-nilai dan norma tersebut ketaraf internasional dengan berusaha berperan dalam masalah terkait sanitasi diberbagai negara, yang mana diharapkan hal ini akan menjadi suatu *sharing identity*. Melalui sistem sanitasi terdapat suatu hal yang lebih besar yang hendak Jepang tawar yaitu tentang standar sanitasi yang baik adalah yang sesuai dengan standar Jepang, terdapat nilai-nilai mengenai budaya, norma dan kebiasaan orang Jepang didalamnya yang hendak Jepang sampaikan pada dunia.

#### **E. Hipotesa**

Jepang aktif berperan didalam masalah sanitasi internasional karena:

1. Jepang ingin membangun konstruksi internasional sebagai negara pelopor sistem sanitasi yang baik.
2. Jepang ingin menyebarluaskan norma negaranya melalui sistem sanitasi yang baik.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan kajian pustaka. Dalam hal ini, penulis menggunakan data-data yang berasal dari tulisan, laporan dari penulis yang didapatkan melalui media seperti buku, jurnal, makalah, majalah, berita, dan publikasi lain yang berhubungan dan sekaligus mendukung proses penelitian.

Analisa isu digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menggabungkan proses tiga aspek yaitu eksplanasi, klasifikasi dan koneksi. Dengan adanya penggabungan ini maka dapat diperoleh analisa yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I:**

Pada bab satu akan membahas Latar Belakang Masalah, yang Mana Latar Belakang masalah ini akan memparkan bagaimana permasalahan ini terjadi. Kemudian juga akan membahas Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II:**

Pada bab kedua akan membahas isu sanitasi di Jepang, regulasi dan kebijakan sanitasi Jepang serta apa yang membedakan sistem sanitasi Jepang dengan sanitasi negara lain, di dalamnya juga akan menjelaskan tentang norma domestik yang terdapat dapat pengembangan sanitasi di Jepang.

### **BAB III:**

Pada bab ketiga akan menjelaskan tentang peran-peran dan usaha-usaha yang dilakukan Jepang dalam masalah terkait sanitasi internasional melalui ODAny.

### **BAB IV:**

Pada bab empat akan membahas substansi utama dari penelitian ini. Didalamnya akan menganalisa dan membuktikan bahwa alasan dibalik peran dan usaha Jepang dalam menyelesaikan masalah terkait sanitasi didasari oleh keinginan Jepang untuk membangun

konstruksi internasional sebagai negara pelopor sistem sanitasi yang baik dan untuk menyebarluaskan *values* negaranya melalui sistem sanitasi yang baik. Selain ini juga akan menjelaskan bagaimana proses persebaran norma tersebut terjadi.

#### **BAB V:**

Pada bab terakhir, penulis akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.